

**STRATEGI PENINGKATAN  
KETAHANAN SOSIAL EKONOMI  
DESA MELALUI SISTEM EKONOMI  
GOTONG ROYONG BERBASIS BADAN  
USAHA MILIK DESA**

*Jurnal Analisa Sosiologi*

*Januari 2022, 11 (1): 142 -166*

**Aris Arif Mundayat<sup>1</sup>, Yuhastina<sup>2</sup>, Bagas Narendra<sup>3</sup>, Gufronudin<sup>4</sup>**

***Abstract***

*This article is an analysis of the potential of the Mutual Cooperation Economic System (MCES) based on social capital and inclusive cooperation to increase social resilience through BUMDes (Village Owned Enterprises). The village's socio-economic resilience is crucial to review. It is considering that the number of villagers in the last 50 years has decreased up to more than 50%. Villages seem to lose their productive force due to the process of urbanization interm of horizontal mobility from rural to urban at the national, regional, and global levels, This situation generates economic pressure to the rural areas as a process of integrating villagers into market citizens. Then the second factor is the spatial urbanization characterized by the integration of the village with the city in terms of space and lifestyle. In this situation, village loses its socio-economic resilience because its productivity tends to decrease. Then pandemic Covid-19 has made the industrial sector laidoff their workers who then returned to villages. The percentage of poverty rate increased from 9.22 percent in September 2019 to 10.14 percent in March 2021. It shows that rural area losses their socio-economic resilience because their productivity tends to decline. This study uses a qualitative research method by conducting observations and Focused Group Discussion with the management to analyze the social-economic potential of the BUMDes Tirtamas Kapanewon, Mlati, Sleman Regency and other VOEs network as the unit of the study. This study shows that VOEs Tirtamas has the potency to develop MCES by building a mutual network with Smal and Micro Enterprises included other VOEs from other villages building a Mutual Cooperation Economic System. The contribution of new ideas is in this study is the idea of Mutual Cooperation Economic System (MCES) as an alternative economy system to coexists with the neoliberal market economy.*

***Key Word: Sosial-Ekonomi Resilience, Mutual Cooperation, VOEs, Neoliberal.***

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Surabaya

<sup>1</sup> khudhriyatul.19074@mhs.unesa.ac.id

### **Abstrak**

Artikel ini merupakan analisis potensi Sistem Ekonomi Gotong Royong (SEGORO) berbasis modal sosial dan kejasama inklusif untuk meningkatkan ketahanan sosial melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Ketahanan sosial ekonomi desa sangat penting untuk ditinjau. Mengingat jumlah penduduk desa dalam 50 tahun terakhir telah berkurang hingga lebih dari 50%. Desa seolah-olah kehilangan tenaga produktifnya akibat proses urbanisasi karena mobilitas horizontal dari desa ke kota di tingkat nasional, regional, dan global. Kemudian faktor kedua adalah urbanisasi spasial yang ditandai dengan integrasi desa dengan kota dari segi ruang dan gaya hidup. Dalam situasi ini desa kehilangan ketahanan sosial ekonominya karena produktivitasnya yang cenderung menurun. Kemudian pandemi Covid-19 pun membuat sektor industri mem-PHK pekerjanya yang kemudian kembali ke desa. Persentase angka kemiskinan meningkat dari 9,22 persen pada September 2019 menjadi 10,14 persen pada Maret 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi dan Focused Group Discussion bersama pihak manajemen untuk menganalisis potensi sosial ekonomi BUMDes Tirtamas Kapanewon, Mlati, Kabupaten Sleman dan jaringan BUMDes lainnya sebagai unit kajian. Kajian ini menunjukkan bahwa BUMDes Tirtamas memiliki potensi untuk mengembangkan SEGORO setelah membangun jaringan gotong royong dengan Usaha Kecil dan Mikro termasuk BUMDes lain dari desa lain yang membangun Sistem Ekonomi Gotong Royong. Kontribusi berupa ide baru dari kajian ini adalah ide SEGORO sebagai sistem ekonomi alternatif yang hidup berdampingan dengan ekonomi pasar neoliberal.

**Kata Kunci:** Ketahanan Sosial-Ekonomi, Gotong Royong, BUMDes, Neoliberal.

### **PENDAHULUAN**

50 tahun terakhir Indonesia mengalami urbanisasi pada aspek kependudukan, ketenagakerjaan, sekaligus gaya hidupnya yang cenderung semakin berbasis pada mata pencaharian di kawasan perkotaan. Selain itu juga dari aspek keruangan kota yang semakin ekspansif sehingga menyempitkan ruang kawasan desa sebagai dampak proses pembangunan (Firman, 2017). Pada tahun 1971, sensus penduduk menunjukkan bahwa persentase penduduk desa adalah 82,7 persen. Artinya pada tahun 1970an sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dikerjakan oleh penduduk desa. 50 tahun kemudian, yaitu pada sensus 2020 yang diterbitkan pada awal tahun 2021 jumlah penduduk kota meningkat sebesar 56,7 persen, artinya penduduk desa menjadi 44.3%.

Semenjak tragedi 1965 berlalu Indonesia menerima investasi sektor pinggiran dari negara-negara Barat yang melakukan restrukturisasi industrial untuk memperoleh tenaga kerja murah. Banyak warga desa yang terserap sektor jasa, industri dan perdagangan dengan pendidikan rata rata setingkat SMA di perkotaan maupun pun menjadi pekerja migran di negara-negara Asia Tenggara, global dan terintegrasi dengan sistem pasar neoliberal. Situasi itu telah mentransformasikan warga negara (citizen) menjadi warga pasar (market citizen). Schild (2000) menganalisis bahwa proses rekonfigurasi kewarganegaraan sosial, menjadi 'kewarganegaraan pasar', di Chili sebagai akibat dari proses neo-institusionalisasi yang mengikuti logika neoliberal di Amerika Latin. Dalam situasi tersebut terjadi proses transformasi budaya-politik modernisasi neoliberal di Chili dan sekitarnya secara radikal. Fenomena yang terjadi di Chili tidaklah hanya terjadi di Amerika latin secara unik namun juga terjadi di Indonesia semenjak 1989, dan semakin meluas pada tahun 200-an. Situasi itu pula yang mengondisikan mobilitas penduduk dari desa ke kota semakin banyak sehingga penduduk desa cenderung mengalami penurunan jumlah. Warga desa menjadi marketizen di kawasan kota. Istilah marketizen tidak digunakan oleh Schild, namun digunakan dalam artikel ini dalam pengertian yang sama dengan market citizen. Pada tahun 1980-an akhir masyarakat mengalami perubahan politik, ekonomi dan budaya karena penerapan model-model kapitalisme yang lebih iberal, negara mengurangi anggaran kesejahteraan, perubahan struktur, dan akuntabilitas organisasi di sektor publik dan swasta, peningkatan risiko, dan kasualisasi (casualization) tenaga kerja yang lebih besar (Pratt, 2006).

Dalam situasi tersebut, peran negara terhadap warga semakin berkurang termasuk pengurangan anggaran program sosial. Tampaknya, negara mengambil asumsi bahwa warga tersebut telah diurus oleh mekanisme pasar tenaga kerja melalui perusahaan. Negara dalam situasi ini cenderung lebih menjadi sub sistem neoliberal, daripada sebagai lembaga yang berkewajiban memenuhi jaminan hak terhadap warganya sesuai konstitusi. Sebagai warga pasar mereka harus berjuang sendiri mengikuti logika pasar dan hanyut di dalam sistem ekonomi pasar neoliberal dengan logika persaingan pasar bebas yang menyebabkan kerentanan sosial.. Dalam

50 tahun terakhir semua itu terbiarkan begitu saja menjadi masalah yang terus bergulir dalam ketimpangan dan kerentanan. Pada saat pandemi Covid-19 masalah kerentanan tersebut tampak dengan jelas yang ditandai oleh runtuhnya hampir semua sektor ekonomi.

Secara historis kerentanan sosial pada masa pandemi tidak terlepas dari kondisi selama 50 tahun terakhir Indonesia. Ketahanan sosial ekonomi masyarakat desa yang lemah merupakan bukti nyata ketika warga negara bertransformasi menjadi warga pasar. Saat pandemi mereka mengalami pemberhentian kerja dari berbagai sektor. Hanya sektor pertanian yang mencakup perkebunan, perikanan darat dan laut, serta pertanian yang bertahan. 6 sektor lainnya yang terdampak parah adalah dimulai dari sektor wisata, jasa, transportasi, konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/15/6-sektor-usaha-paling-terdampak-saat-pandemi-corona>). Jumlah pengangguran pun bertambah 3,7 juta pada tahun 2020. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2020. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) mencapai 7,07 persen dari 138,22 juta angkatan kerja. Artinya terdapat 9,77 juta penduduk pengangguran terbuka. Walaupun terjadi kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 0,24 persen poin menjadi 67,77 persen, terjadi penurunan pada jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan klasifikasi tempat tinggal terdapat 8,98 persen pengangguran dari jumlah tersebut. Sedangkan untuk daerah perdesaan terdapat 4,71 persen penduduk. Pertumbuhan ekonomi pun mengawali kemerosotan yang sangat bermakna yaitu dari 5.07% pada tahun 2019 menjadi 2.97% pada tahun 2020 (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>).

Desa telah kehilangan ketahanan sosial ekonominya, sehingga mereka mau tidak mau harus tetap bekerja setiap hari meskipun dengan resiko tertular Covid-19 yang mematikan. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian ini mempertanyakan bagaimana Sistem Ekonomi Gotong Royong (SEGORO) dioperasikan melalui BUMDes sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat Desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan antropologi ekonomi ini mewawancarai pengurus dan mengobservasi konteks sosial ekonomi BUMDes Tirtamas di wilayah Kapanewon Mlati, Sleman, Yogyakarta. Lembaga ini dipilih untuk diteliti karena paling menonjol dalam mengelola kegiatan ekonomi secara produktif, inovatif seperti membangun *smart village*, membuat aplikasi online untuk memasarkan produk dari desa melalui BUMDes. Data juga diperoleh dari FGD (*Focused Group Discussion*) dengan pengurus BumDes Tirtamas, beserta jaringannya dengan BUMDes lainnya, yaitu BUMDes Sindu Mandiri dari desa Sinduadi, BUMDes dari Desa Minggir. Keseluruhan pengurus yang terlibat dalam kajian ini berjumlah 7 orang yang kesemuanya pengurus BUMDes tersebut. Validasi data berlangsung melalui proses triangulasi sumber data melalui pengecekan konsistensi informasi informan. Triangulasi terhadap hasil pengamatan juga dilakukan melalui nara sumber dan di cek ulang melalui sumber sekunder berupa berita yang telah dipublikasikan. Kajian ini juga melakukan perbandingan dengan BUMDes lain di Indonesia melalui data sekunder untuk menemukan persamaan dan perbedaan.

Kajian ini menggunakan analisis Tafsir Reflektif Kritis dari Mundayat (2021) dengan melakukan penggalian data pada ranah mikro, data mezzo, dan makro agar dapat menganalisis efek neoliberalisme terhadap ketahanan sosial ekonomi di tingkat desa. Data yang berasal dari wawancara, FGD, observasi dan dokumen kemudian dianalisis dengan memperhatikan hubungan dengan konteksnya. Pola hubungan yang ada kemudian digunakan untuk membangun kerangka konseptual, analisis dengan penafsiran secara reflektif dan kritis. Setelah semua tahap dilalui maka proses penarikan kesimpulan dilakukan sekaligus untuk merumuskan rekomendasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### **BUMDes dalam Pusaran Sistem Ekonomi Neoliberal**

Program Marshal Plan (yang dirumuskan sekitar 1947–1951) yang dipengaruhi oleh pemikiran John Maynard Keynes merupakan program ekonomi berskala global untuk proses liberalisasi (Nicolaus, 2008). Marshal Plan pada masa Soekarno pun ikut berperan sebagai katalis antara Indonesia dengan Belanda yang akhirnya mau mengakui kemerdekaan Indonesia (Piere, 2009). Kemudian pada era Orde Baru pengaruh Marshal Plan muncul dalam bentuk bantuan ekonomi. Pada akhir 1980an Indonesia pun melakukan restrukturisasi sistem ekonomi makro untuk menjalankan neo-institusionalisasi Washington Concensus 1989. Deregulasi sektor perbankan dan investasi dilakukan untuk memuluskan institusionalisasi neoliberalisme yang merambah ke semua sektor usaha, hingga ke sektor pendidikan. Labour market flexibility dan outsourcing pun diterapkan meskipun cenderung menciptakan ketidakpastian, dan kerentanan sosial ekonomi bagi tenaga kerja (Williamson, 1989; Wade, 2007). Bagi Harvey (2010:2) neoliberalisme bukanlah sekedar teori tentang mekanisme pasar liberal, namun juga teori politik. Oleh karena itu ia mendefinisikan neoliberalisme sebagai:

“a theory of political economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets and free trade. The role of the state is to create and preserve an institutional framework appropriate to such practices” (Harvey, 2010:2)

Neoliberalisme sebagai instrumen politikal ekonomi memiliki sisi positif dengan perubahan pada tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. Namun sisi negatifnya semenjak 1990-an telah memberikan efek berupa ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan tidak hanya tampak pada

rasio gini saja, namun hal itu dapat diamati dari ketimpangan ruang maupun regional. Kawasan perkotaan jauh lebih maju dibandingkan pedesaan, kemudian regional Indonesia wilayah Timur lebih tertinggal daripada Tengah. Indonesia Tengah lebih tertinggal daripada Indonesia Barat dari segi infrastruktur apa pun. Dalam konteks Indonesia, situasi ketimpangan tersebut menciptakan ketergantungan regional yang tertinggal pada yang maju, meskipun Indonesia Timur dan Tengah merupakan penyumbang PDB yang tinggi. Artinya terjadi ekstraksi ekonomi ke kawasan Barat. Desa pun terekstraksi menjadi penyangga pangan dan tenaga kerja perkotaan. Insfrastruktur desa pun tertinggal sehingga warga desa sering tergantung pada sektor diperkotaan.

Amandemen UUD 1945 pada awal reformasi telah mengubah karakter sosial demokrasi dari konstitusi dan memuluskan neo-institusionalisasi neoliberalisme. Dalam praktiknya aliansi oligark ekonomi dan politik lebih mewarnai kehidupan sosial-politik-ekonomi pasca reformasi. Semenjak itulah proses demokrasi cenderung lebih diwarnai oleh kepentingan aliansi politiko-bisnis. Penelitian Tempo menemukan 45% (262 orang dari 575 jumlah total) anggota DPR namanya tercatat pada 1.016 perseroan terbatas. Ini artinya mereka dengan mudah mempengaruhi kebijakan pasar melalui parlemen yang membajak tata kelola politik dan sistem birokrasi pemerintahan.

Praktik *good governance*, transparansi dan akuntabilitas yang semestinya bersifat positif tidak dapat dijalankan. Logika *political capitalism* seperti yang diargumenkan oleh Max Weber ditandai oleh aliansi politiko-bisnis dalam ruang politik. Istilah *political capitalism* berasal dari Max Weber (1922) yang mendefinisikan sebagai sistem ekonomi dan politik di mana elit ekonomi dan politik bekerja sama untuk saling menguntungkan. Elit ekonomi mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah menggunakan peraturan, pengeluaran pemerintah, dan desain sistem pajak untuk mempertahankan status elit mereka dalam perekonomian. Elit politik kemudian didukung oleh elit ekonomi yang membantu politik elit mempertahankan status mereka; hubungan pertukaran yang menguntungkan baik elit politik dan ekonomi. Kekuatan politik partai bersekutu dengan

pelaku bisnis untuk menghasilkan undang-undang yang lebih menguntungkan ruang gerak bisnis dan mendistorsi demokrasi.

Thomas Lemke (2001), yang dipengaruhi oleh Michele Foucault menjelaskan bahwa neoliberal governmentality berlangsung melalui pendisiplinan dalam pasar yang kompetitif dan pengelolaan politik neoliberal. Dalam praktik di Indonesia pendisiplinan neoliberalisme gagal dicapai sehingga yang terbentuk bukan neoliberal governmentality namun political capitalism governmentality. Michele Foucault (2008) menjelaskan bahwa governmentality merupakan biopolitik yang terjadi melalui pendisiplinan yang kemudian membentuk regime kebenaran. Oleh Thomas Piketty (2020) hal itu disebut sebagai rejim ketimpangan, karena neoliberalisme menciptakan ketimpangan sosial ekonomi yang hebat.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) saat berdiri tahun 2014 berada dalam konteks pusran politikal ekonomi neoliberalisme, sehingga harus berkompetisi dalam pasar bebas, dan berhadapan dengan waralaba yang hadir di tingkat kecamatan. Usaha waralaba adalah sistem ekonomi kolaboratif yang melibatkan banyak pihak dari hulu ke hilir. Penguasaan jaringan dari hulu ke hilir membuat sistem ekonomi kolaboratif waralaba mampu melakukan efisiensi distribusi sehingga harga komoditas menjadi kompetitif.

Di pasar mereka berkompetisi dengan kedai milik warga setempat yang modalnya jauh lebih kecil. Berdasarkan observasi dalam kajian ini di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat kebijakan Bupati yang mendorong Indomaret dan Alfamaret untuk bekerja sama dengan Tomira (Toko Milik Rakyat) untuk menampung produk UMKM yang memenuhi standard mutu Indomaret/Alfamaret yang ada di kabupaten tersebut. Meskipun dalam perjanjian kerjasama antara Tomira dengan Indomaret/Alfamaret berkesepakatan untuk memberikan ruang untuk menjual produk UMKM hingga 10%, namun dalam kenyataannya produk UMKM tidak mampu memenuhinya bahkan hanya mampu kurang dari 5% ruang yang disediakan. Hal ini terjadi karena UMKM lebih merasa bahwa komoditas yang mereka hasilkan lebih cepat laku di pasar tradisional, dan kedai-kedai yang ada di sekolahan.



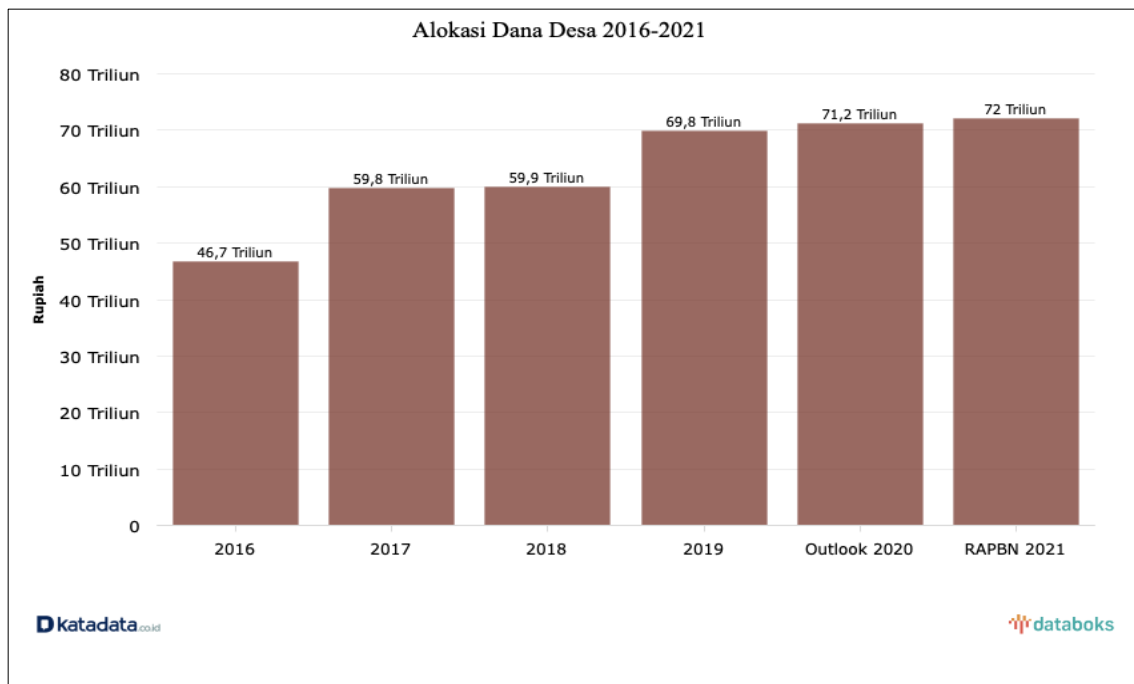
Harga komoditas yang dijual oleh kedai warga lebih mahal karena biaya transportasi yang harus mereka tanggung. Dalam situasi kompetisi yang asimetris tersebut, maka pelaku pasar individual tidak mampu bersaing dengan gerai waralaba seperti Indomaret dan Alfamaret yang hadir hingga di pedesaan. Indomaret merupakan jaringan minimarket dari Salim Group yang menjual kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang tersebar di seluruh Indonesia. Toko pertama Indomaret dibuka di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tahun 1988, dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. Sembilan tahun kemudian bisnis gerai waralaba indomaret berkembang hingga mencapai 230 gerai. Pada tahun 2015 jumlahnya telah mencapai 11.400 gerai. 60% gerai merupakan milik perorangan dan sisanya waralaba milik masyarakat. Pada Juni tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah gerai menjadi 18.939 dengan mitra usaha meliputi koperasi, badan usaha dan perorangan (<https://indomaret.co.id/korporat/seputar-indomaret/peduli-dan-berbagi/2014/01/16/sejarah-dan-visi/>).

Sementara itu Alfamart berawal dari PT. Alfa Mitra Utama yang kemudian beralih kepemilikan menjadi PT. Sumber Alfaria Trijaya. Pada mulanya Alfamaret bernama Alfa Mini Mart yang kemudian berganti nama Alfamaret pada tahun 2003. Jumlah gerai telah mencapai 15.102 di 32 cabang di Indonesia. Alfamaret Jakarta dan Tangerang merupakan gerai terbesar. Pemilik saham mayoritas adalah PT. HM. Samoperna (70%) dan PT. Sigmantara Alfindo (30%). Berdasarkan kesuksesan di Indonesia kemudian Alfamaret mengembangkan usaha di Filipina dengan mengajak SM Investments Corporation dengan buka cabang di Trece Martires pada tahun 2016. Pada 11 November 2020, cabang Alfamaret di Filipina telah memiliki 1000 cabang, dan akan terus berkembang (<https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/sejarah>).

Situasi tersebut menunjukkan kolaborasi ekonomi berbasis usaha waralaba tidak memberikan efek berbagi yang *generative* karakter ekonominya. Menurut Belk (2010, 2014) sistem ekonomi bisnis masa depan adalah bersifat berbagi dan menjalankan proses yang kolaboratif sifatnya. Meskipun demikian, Belk (2010, 2014) tidak memberikan penjelasan apakah ekonomi tersebut kolaborasi tersebut bersifat *generative* dalam arti

mensejahterakan pekerja atau ekstraktif yang merugikan pekerja. Sistem ekonomi kolaboratif melalui taksi daring dirasakan oleh pengemudi taksi karena tidak meningkatkan kesejahteraan kecuali hanya untuk bertahan hidup. Wawancara dengan pengemudi taxi daring dilakukan sebagai pembandingan untuk mengetahui apakah mereka merasa memperoleh peningkatan kesejahteraan atau tidak dengan model kolaboratif ekonomi. Pengemudi taksi dalam hal ini menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki perlindungan hukum karena tidak dianggap sebagai pekerja melainkan sebagai mitra.

BUMDes pada masa pemerintahan Joko Widodo bertujuan untuk penguatan ekonomi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Presiden Jokowi pada mulanya menargetkan 5.000 BUMDes namun dalam kenyataannya lebih dari target. Jika dilihat dari kondisi demografi di pedesaan yang langka tenaga kerja muda dan beratnya kompetisi pasar neoliberal, pendirian BUMDes dapat dikatakan lebih memiliki nilai politis dibandingkan nilai ekonomi. Meskipun demikian bukan berarti nilai ekonomi BUMDes bagi warga desa dikesampingkan. Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi, menyampaikan informasi bahwa pada awal Oktober 2018, sudah berdiri sebanyak 41.683 BUMDes. Pada hal pada akhir 2014, jumlah BUMDes baru 1.022, artinya dalam empat tahun jumlah BUMDes meningkat 40 kali lipat atau delapan kali dari target awal RPJMN (Katadata 30 November 2018, "Jumlah BUMDes Meningkat Delapan Kali Lipat" dalam [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id). <https://katadata.co.id/arsip/berita/5e9a558e3db16/dana-desa-bertambah-kemiskinan-berkurang>. Dana desa 2016-2021 pun meningkat dari 46,7 Trilyun Rupiah menjadi 72 Trilyun Rupiah. Dana yang disalurkan ke BUMDes sesuai dengan peraturan pemerintah besarnya adalah 20% dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk dikelola desa (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/25/berapa-alokasi-dana-desa-dalam-rapbn-2021>).

**Tabel 1: Besaran Alokasi Dana Desa 2016-2021**

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/25/berapa-alokasi-dana-desa-dalam-rapbn-2021>

Berdasar Peraturan kementerian Desa (Permendes) No. 19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, berbagai kegiatan atau program yang bisa dilakukan desa dengan dana desa adalah:

1. Mendukung dari sisi permodalan pada pengelolaan usaha ekonomi yang produktif.
2. Menjalankan peran distribusi dan pemasaran bagi usaha pertanian yang produktif dan usaha lainnya yang arahnya adalah pembentukan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan desa dalam BUMDes Bersama.
3. Memberikan akses modal pada pada warga/kelompok, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
4. Dana desa bisa digunakan untuk melakukan perluasan usaha produktif di desa dengan sistem penyertaan modal pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran menuju terciptanya produk unggulan desa atau kawasan pedesaan bagi BUMDes Bersama
5. Untuk mendukung perluasan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Model pemberdayaan desa melalui BUMDes merupakan ekspresi otoritas pemerintah pusat dengan penggelontoran anggaran dari pusat ke

tingkat desa. Desa yang mengalami kelangkaan sumber daya usia produktif, dan lingkungan ekonominya kompetitif harus menjalankan mandat tersebut. Dalam situasi itu, BUMDes harus berhadapan dengan usaha waralaba seperti Indomaret (didirikan pertama kali pada tahun 1997) maupun Alfamart (didirikan pada tahun 1999) yang telah membangun jaringan kolaborasinya sendiri, dan telah berdiri jauh lebih awal dibandingkan dengan BUMDes.

BUMDes dibangun berdasarkan Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 tanpa disadari ikut berkompetisi di pasar neoliberal. BUMDes ada yang sukses menjadi tulang punggung ekonomi Desa hingga mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) miliaran rupiah nilainya. BUMDes "Tirta Mandiri" Desa Ponggok Kabupaten Klaten adalah contoh keberhasilan. Badan usaha ini mengelola sektor wisata umbul (sumber air) dengan sejumlah rangkaian usaha ekonomi produktif lainnya. Penghasilan BUMDes Tirta Mandiri telah mencapai Rp 14 Milyar pada tahun 2017 dengan nilai sekitar Rp 1 Milyar lebih per bulan. Namun pandemi-Covid 19 memukul semua lini perekonomian Indonesia akibatnya dana desa tidak lagi dapat diikutkan ke dalam skema BUMDes. Akibatnya, sekitar 35% BUMDes terpaksa menutup usahanya, dan ini kerugian ekonomi yang sangat besar (Katadata 30 November 2018, "Jumlah BUMDes Meningkatkan Delapan Kali Lipat" dalam <https://katadata.co.id/arsip/berita/5e9a558e3db16/dana-desa-bertambah-kemiskinan-berkurang>).

Bahkan penghasilan BUMDes paling berhasil yaitu di desa Ponggok, Klaten penghasilan perbulan turun 80% atau menjadi Rp 200 Juta per bulan (<https://indonesiabaik.id/infografis/bumdes-untuk-pembangunan-desa> dan <https://jateng.tribunnews.com/2021/09/04/dampak-pandemi-pendapatan-wisata-umbul-ponggok-klaten-turun-80-persen>. Diunduh pada 20 September 2021).

Ada pula BUMDes di Desa Semagar, Wonogiri, Jawa Tengah, yang berhasil mengentaskan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh 130 keluarga dengan memanfaatkan skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) ekonomi produktif. Skema tersebut digunakan untuk membayar honor warga untuk

menghasilkan batik yang dikerjakan di rumah masing-masing sebagai kegiatan ekonomi yang secara khusus melibatkan warga dari keluarga kurang mampu. Selain itu ada pula BUMDes yang juga berhasil dengan sektor wisata seperti BUMDes di desa Ponggok Klaten. Wisata Setigi Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur merupakan hasil dari pengembangan BUMDes di desa tersebut. Pengurus mengubah bekas galian tambang kapur yang berbentuk tebing dari bukit kapur menjadi lokasi yang menarik wisatawan. Sebelumnya tebing dan bekas galian tidak bermanfaat kecuali untuk pembuangan sampah yang kumuh. Melalui pengembangan sektor tersebut sektor jasa dan UMKM ikut menikmati efek positifnya. Dalam waktu 3 tahun, BUMDes desa itu terbuka lapangan kerja bagi 899 kepala keluarga dengan pendapatan awalnya Rp 400.000 sebulan menjadi kisaran Rp 6-7 juta perbulan.

Jika dibandingkan antara BUMDes yang aktif dengan yang tidak aktif, data pada tahun 2021 menunjukkan terdapat 45.233 BUMDes yang aktif, dan 12.040 BUMDes yang tidak aktif. Di antara yang aktif terdapat 15.768 Bumdes atau 35% terdampak pandemi hingga tutup usaha dan merumahkan 123.176 pekerjanya. Dari data tersebut tampak bahwa BUMDes yang aktif dan tidak terdampak pandemi Covid-19 tersisa 17.425. Namun tidak dapat diperoleh data tentang kondisi BUMDes tersebut. Pada saat masih aktif 45.233 BUMDes yang masih aktif tersebut telah mempekerjakan 20.369.834 orang dengan omset Rp 4,6 triliun selama setahun terakhir. Ini pukulan yang berat bagi BUMDes yang sebagian besar masih tergantung pada dana APBDes. Sektor usaha yang dilakukan oleh BUMDes dapat memiliki lebih dari satu usaha sesuai dengan kemampuan pengelolaan dan juga dari potensi desanya. Tabel 1, di bawah ini menunjukkan jumlah BUMDes aktif berdasarkan jenis usaha.

**Tabel 2: Jumlah BUMDes Aktif Berdasarkan Jenis Usaha**

<b>BUMDes Aktif</b>	<b>Ragam Jenis Usaha</b>
678	Usaha Sektor Pariwisata

813	Jasa Perantara, Bengkel, Kios, Photo Copy, Penggilingan Padi
2.870	Usaha Keuangan (Simpan Pinjam, keuangan ikro, agen perbankan, kredit)
3.678	Perdagangan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan sembilan bahan pokok.
4.225	Persewaan (sewa gedung, tenda, sound system, peralatan)
1.540	Pengolahan air bersih, listrik, dan sampah
<b>Keterangan Jumlah Total</b>	<b>13.804</b> dari 15.768 BUMDes terdampak pandemi Covid 19 yang terdeteksi aktif oleh Kementerian Desa, PDTT. Terdapat selisih sebesar 1964 dan tidak ada informasi mengenai selisih tersebut

Sumber: Data diolah dari <https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-35-bumdes-di-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>

Jenis usaha BUMDes dalam tabel di atas tampak merupakan jenis usaha yang berkarakter sama dengan sektor usaha para pelaku pasar di desa. Ini artinya sektor usaha BUMDes berpotensi untuk bersaing secara kompetitif dan dapat berefek negatif terhadap pelaku usaha di desa yang bermodal jauh lebih kecil dari BUMDes. Sektor usaha BUMDes merupakan pilihan yang ironis karena dapat menjadikan mereka sebagai predator bagi sektor usaha kecil warganya. BUMDes yang mengembangkan sektor usaha pariwisata yang tidak berkompetisi dengan warga namun justru bersifat generatif bagi warga yang mau memanfaatkan keberadaan sektor wisata.

Tidak semua BUMDes berhasil, karena memang, potensi masing-masing desa berbeda, termasuk ketersediaan tenaga kerjanya. Hasil FGD dengan 3 BUMDes yang melibatkan 7 orang pengurus dalam penelitian ini memiliki kesamaan pandangan bahwa tentang kesulitan pengelolaan. Menurut para pengurus BUMDes:

“Mengelola BUMDes tidaklah mudah, tergantung pada potensi dan ketersediaan tenaga di desa. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda. Kami pengurus BUMDes Tirtamas merasa beruntung

desanya memiliki potensi wisata”. “Kami di Sinduadi pengurusnya pun merasa diuntungkan dengan adanya sumber air untuk diproduksi sebagai air kemasan.”

Berbeda dengan pengurus BUMDes Desa Minggir yang mengatakan bahwa:

“Kami di desa Minggir masih sedang mencari potensi desa untuk kegiatan ekonomi BUMDes. Sama seperti BUMDes lainnya kami juga tidak mau punya kegiatan ekonomi yang bersaing dengan apa yang sudah dilakukan oleh warga. Kami pun di sini mengalami kesulitan tenaga kerja muda untuk terlibat dalam BUMDes.”

Sementara itu, pengurus BUMDes Turtamas dan Sindu Mandiri juga mengatakan bahwa:

“Dalam situasi ini kami pengurus BUMDes dan Kepala Desa memiliki keleluasaan dalam mendesain program yang benar-benar sesuai karakter potensi dan menysasar kebutuhan masyarakat, bagi kami yang penting tidak bersaing dengan warganya sendiri.”

BUMDes yang mengelola sektor pariwisata dan sumber daya alam cenderung berhasil dibandingkan dengan yang mengembangkan sektor perdagangan atau jasa. Hal ini dapat terjadi karena sektor tersebut telah dijalankan oleh warga sehingga pengurus BUMDes enggan untuk bersaing.

Secara nasional, bagi BUMDes yang sudah berhasil dapat memutar kembali modal yang sudah terakumulasi, jika belum maka kagiatan BUMDes terancam berhenti. Bahkan, pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki 2.188 BUMDes yang tidak beroperasi, dan terdapat 1.670 BUMDes beroperasi, namun belum memberikan kontribusi kepada pendapatan desa. Tentu saja ini persoalan yang serius mengingat BUMDes telah menyerap anggaran yang sangat besar (<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a4c49e951c/jokowi-perintahkan-anak-buah-perbaiki-2188-bumdes-yang-tak-jalan>). Melihat kondisi tersebut Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengambil langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan BUMDes selama pandemi. Kebijakan pertama dijalankan melalui PP No

11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa untuk memudahkan dalam menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain. Peraturan Pemerintah tersebut juga berkaitan dengan turunan dari UU Cipta Kerja terkait. Kebijakan kedua berbasis pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3/2021, menyiapkan situs jaringan bernama “[bumdes.kemendes.go.id](https://bumdes.kemendes.go.id)” untuk mempermudah pendaftaran badan hukum Bumdes dan Bumdes Bersama. Melalui upaya tersebut pada 14 September 2021 terdapat 17.069 BUMDes dan 1.050 BUMDes Bersama yang mendaftarkan badan hukum (Sumber berita <https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-35-bumdes-di-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>. Diunduh pada 20 September 2021).

## **Pembahasan**

### **Strategi SEGORO Berbasis Kerjasama Antar BUMDes**

Menurut para pengurus BUMDes, mereka memulai usaha dengan menggunakan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) pada tahun 2015 adalah Rp 300 juta per tahun. Di sejumlah desa di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta modal APBDes ke BUMDes biasanya diumumkan melalui *banner* besar yang dicetak dan dipasang di kantor BUMDes. Pada masa Pandemi Covid-19 penyertaan dana desa dihentikan sementara, sehingga kegiatan BUMDes terganggu permodalannya. Desa Tirtoadi memiliki BUMDes berbasis pada potensi pariwisata sehingga lebih tangguh dibanding desa yang tidak memiliki potensi wisata. Desa tersebut semenjak tahun 2002 telah mengembangkan sektor wisata yang mengandalkan keberadaan embung air ysebagai ruang publik wisata. Pada saat BUMDes Tirtamas di dirikan pada tahun 2019 secara tepat telah meletakkan sektor usahanya pada fakta objektif berdasarkan potensi desa yang ada dan telah berkembang.

Wahjudi Djaja yang menjabat sebagai Direktur BUMDes semenjak 30 Maret 2019 memimpin usaha tersebut dengan memanfaatkan kawasan Embung Senja sebagai modal utamanya. Target pertama dari pengurus BUMDes adalah mendukung program Desa Wisata Budaya, dan kemudian disusul dengan pengembangan area wisata seluas 2 Ha untuk membangun



Kebun Binatang. Proyek sudah dimulai namun pandemi menghambatnya. Selain sektor wisata, kekuatan ekonomi desa juga memiliki sentra kerajinan bambu yang dikelola oleh sejumlah UMKM yang telah membentuk forum. Forum Komunikasi UMKM memiliki potensi sebagai salah satu motor penggerak perekonomian masyarakat desa di Kapanewon Mlati. Keberadaan UMKM tersebut kemudian difasilitasi oleh BUMDes Tirtamas untuk ikut memanfaatkan kawasan Embung Senja sebagai lokasi untuk memamerkan produknya. Terkait dengan hal tersebut, Wahjudi Djaja bersama pihak Kapanewon Mlati, dan Forum UMKM menyelenggarakan Gebyar UMKM “Mlati Gumregah” 16-18 Oktober 2020 bertempat di Embung Senja, Sendari, Tirtoadi, Mlati Sleman. Beragam produk khas mulai dari kerajinan, fashion dan aneka kuliner akan dipromosikan dalam acara ini, dan berhasil melakukan transaksi sebesar Rp 23 juta.

Dalam kesempatan tersebut Wahjudi Djaja selaku Direktur BUMDes menjalin kerjasama dengan UMKM dari lima desa disekitarnya untuk bersinergi membangun basis produksi desa. BUMDes Tirtamas pun kemudian menyiapkan “Aplikasi Tirtamart” agar UMKM dapat ikut memasarkan produknya secara *online*, bersama komoditas lain yang berasal dari masyarakat desa Tirtoadi dan sekitarnya. Dalam acara FGD penelitian ini, pada awal kerja pengurus BUMDes merasakan bahwa:

“Bukan lah hal yang mudah bagi BUMDes untuk menjalankan kegiatan ekonomi.” BUMDes seperti Tirtamas, Sendang Sari dan Sindu Mandiri menyatakan bahwa “kami mengutamakan untuk dapat menjalankan berbagai program berbasis potensi alam yang ada di desa daripada harus bersaing dengan warganya.”

Tampak bahwa Pengurus BUMDes Sendang Sari dan Sindu Mandiri memiliki prinsip persaingan dengan sektor usaha milik warga maupun yang dari jaringan wara laba berdasarkan prinsip moral agar tidak menggilas warga sendiri dan BUMDes tidak dikalahkan oleh usaha berjejaring wara laba karena menggunakan uang rakyat. BUMDes Tirtamas merasa lebih beruntung karena desanya memiliki potensi wisata dengan keberadaan kawasan Embung air, yang kemudian diberi nama Embung Senja. Dari kawasan wisata ini justru dapat membuka kesempatan warga untuk ikut

memanfaatkan lokasi wisata sehingga usaha dari sektor pariwisata lebih bersifat generatif bagi warganya.

Para pengurus BUMDes dari tiga desa dalam penelitian ini menjelaskan bahwa “pada masa Pandemi Covid-19 BUMDes tidak lagi memperoleh dana penyertaan dari APBDes sebesar Rp 300 juta, karena anggaran difokuskan untuk menghadapi pandemi.” Berbasis pada keuntungan dari modal yang dikembangkan dari sektor wisata BUMDes Tirtamas dan sejumlah suntikan dana segar dari pusat akhirnya Wahjudi Djaja beserta pengurus lain berhasil menerapkan program *Smart Village* dengan bekerjasama dengan provider jaringan internet untuk memfasilitasi warga dengan jaringan internet murah. Upaya ini dilakukan pada saat anak-anak usia sekolah di desanya harus menghadapi masa pandemi dengan belajar di rumah. Kondisi jaringan internet yang terbatas, belum lagi anak-anak usia sekolah dari keluarga yang kurang mampu sangat memerlukannya.

Melalui konsep *Smart Village*, BUMDes Tirtamas berhasil memfasilitasi warganya untuk belajar dari rumah. Bagi keluarga yang kurang mampu dapat berbagi jaringan internet sehingga iuran per bulan yang besarnya Rp. 100.000,00 dapat ditanggung oleh sejumlah keluarga sehingga lebih ringan biayanya. Program *Smart Village* dan aplikasi Tirtamas merupakan program yang juga dapat dimanfaatkan oleh warga desa untuk menjual produknya melalui kerjasama dengan BUMDes atau antar BUMDes. Di dalam situasi pandemi strategi ini menunjukkan manfaatnya karena kebijakan nasional yang membatasi gerak masyarakat dapat diatasi. Oleh karena program tersebut masih relatif baru maka semuanya harus berjalan secara bertahap. Kesulitan dalam menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk memasang jaringan masih terkendala modal yang selama Covid pihak desa menghentikan sementara penyertaan modalnya.

Sementara dalam situasi krisis karena pandemi, maka yang dilakukan oleh BUMDes Tirtamas, Sindu Mandiri, dan Sendang Sari adalah memetakan kembali potensi produktif dari desanya agar BUMDes lebih menguntungkan warganya daripada menjadi pesaing. Wahjudi Djaja menyadari bahwa bukan hal yang mudah untuk membangun lini bisnis di tingkat desa karena tenaga kerja muda produktif telah banyak meninggalkan

desanya. Pandangan tersebut juga diakui oleh pengurus BUMDes yang lainnya dalam FGD, bahkan kesulitan yang mereka hadapi oleh tiga BUMDes tersebut hampir sama. Bahkan kesulitan tersebut juga dialami oleh BUMDes lain di Indonesia.

Ide SEGORO ini menurut Wahjudi Djaja selaras dengan pemikirannya selama ini. Ia menekankan bahwa: “Kami pengurus BUMDes selalu mempertimbangkan agar BUMDes tidaklah menyaingi sektor usaha yang sudah dilakukan oleh warganya”. Ia dapat merasakan beratnya berusaha dengan modal seadanya seperti yang dilakukan oleh warga desa yang kemudian mereka harus berhadapan secara kompetitif dengan sektor usaha seperti Indomaret dan Alfamaret yang menjalankan ekonomi kolaboratif secara nasional. Oleh karena itu ia BUMDes Tirtamas membuka kawasan wisata Embung Senja sebagai ajang promosi produk lokal dan produk BUMDes lain yang berjejaring termasuk dengan UMKM yang ada disekitar desa.

Sistem Ekonomi Gotong Royong yang menjadi ide alternatif dari neo liberlisme ekonomi bersandar pada kerjasama mutualistik antar pemangku kepentingan untuk menjamin para pelaku pasar terhindar dari kehidupan sosial ekonomi yang rentan. Moralitas Sistem ekonomi Gotong Royong diletakkan dalam konteks tujuannya yaitu untuk membangun sistem ekonomi generatif yang mensejahterakan secara distributif, dan setiap transaksinya tidak mengandung nilai lebih yang membebani. Prinsip SEGORO adalah mengembangkan mekanisme pasar yang manusiawi, berkeadilan distributif, dan beradab untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif. Para pemangku kepentingan kemudian membangun Poros Segoro sebagai pusat koordinasi dan fasilitasi antar pemangku yang terlibat dalam keseluruhan mata rantai pasok-produksi-distribusi-pasar untuk menjamin terjadinya pemerataan keuntungan. Negara dapat hadir di dalamnya untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.

BUMDes yang telah dibangun oleh pemerintah memiliki potensi untuk menjadi basis dari SEGORO. Kajian ini meneliti potensi BUMDes Tirtamas, Sindumandiri, dan Sendang Sari, masing masing dari desa

Tirtoadi, Sinduadi dan Minggir di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta telah bersepakat untuk membangun kerjasama dengan prinsip SEGORO. BUMDes tersebut pada dasarnya tidaklah mampu berhadapan dengan kompetisi asar neoliberal sebagai lingkungan ekonomi pasarnya. Dalam situasi tersebut pengurus BUMDes sulit untuk menentukan pilihan apakah ikut bersaing di dalam mekanisme pasar yang dapat merugikan sektor usaha warga desa atau dikalahkan oleh pelaku usaha bermodal lebih besar. Bukan pilihan yang mudah bagi pengurus BUMDes ketika mereka mempertimbangkan aspek moral ekonomi pasar. Dari pengalaman BUMDes di tempat lain seringkali mereka harus menjalankannya secara terpaksa karena anggaran telah digelontorkan untuk dapat dimanfaatkan. Akhirnya banyak diantara mereka yang harus mengikuti logika pasar neoliberal. Banyak diantara mereka yang runtuh dan ada pula yang berhasil, terutama BUMDes yang berbasis pada sektor usaha pariwisata.

Pertimbangan moral ekonomi merupakan modal yang dimiliki pengurus BUMDes untuk tidak melakukan persaingan di pasar. Dalam pertemuan FGD (*Focused Group Discussion*) dengan pengurus tiga BUMDes ide Sistem Ekonomi Gotong Royong (SEGORO) digulirkan untuk mengatasi dilema yang terkait dengan moralitas ekonomi pasar yang masih berlaku di tingkat desa. Mereka pada dasarnya menerima SEGORO selama tidak untuk bersaing dengan sektor usaha milik warga desa dan untuk tujuan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan FGD tersebut pengurus BUMDes yang hadir bersepakat untuk membangun jejaring antar BUMDes dan tiga BUMDes yang dikoordinasi oleh BUMDes Tirtamas, menyepakati model SEGORO untuk dipraktikkan sebagai model ekonomi. BUMDes Tirtamas, Desa Tirtoadi, Kapanewon Mlati Sleman selama ini telah mengelola sektor usaha pariwisata. Sementara itu BUMDes Sindu Mandiri sedang mengembangkan usaha air kemasan, yang kemudian BUMDes Sendang Sari mengajak untuk bekerjasama memproduksi air kemasan. Ketiga BUMDes tersebut kemudian bersepakat untuk dapat memanfaatkan lokasi pasar di masing-masing wilayah untuk saling memasarkan produk dari UMKM dari masyarakatnya yang bekerjasama. Melalui cara ini mereka tidak bersaing melawan sektor usaha yang ada di

desa masing-masing.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh pengurus BUMDes adalah ketiadaan sumber daya baik hasil produksi yang dapat diandalkan maupun tenaga muda yang dapat menggerakkan BUMDes. Oleh karena itu sebagian dari pengurus BUMDes adalah senior di desanya, paling muda usianya sekitar 40-an tahun, dan sebagian besar tidak memiliki pengalaman berbisnis. Mereka lebih merupakan tokoh desa yang aktif secara sosial, sehingga dengan modal sosial itulah mereka menggerakkan BUMDes. Kondisi ini menjadi kendala mendasar dalam pengembangan BUMDes. BUMDes di Desa Sinduadi dan Minggir bersepakat bekerjasama untuk memproduksi air kemasan, karena desa mereka memiliki sumber air yang berpotensi. Dalam pertemuan di FGD semua pengurus yang hadir juga bersepakat untuk saling kerjasama dalam memasarkan produk warga yang dikelola oleh BUMDes untuk membantu warganya memasarkannya. Produk utama dari masing-masing BUMDes juga dapat dipasarkan melalui jaringan yang telah disepakati, termasuk menggunakan ruang wisata Embung Senja yang dikelola oleh BUMDes Tirtamas sebagai ajang pemasaran. Di dalam FGD pun Wahjudi Djaja mempersilahkan BUMDes Sindu Mandiri dan Sendang Sari untuk ikut memanfaatkan aplikasi yang telah disiapkan oleh BUMDes Tirtamas karena dengan demikian kerjasama juga dapat meningkatkan penggunaan efisiensi pasar dalam jaringan secara bersama. Prinsip SEGORO ini paling tidak memiliki potensi untuk dijalankan lebih lanjut setelah pandemi Covid-19 berakhir secara lebih produktif.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini mengidentifikasi adanya kecenderungan bahwa sepanjang arus besar globalisasi neo-liberal telah menjadikan mereka sebagai warga pasar daripada warga negara. Ide BUMDes dalam konteks tersebut sesungguhnya penting untuk dilaksanakan, namun dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang ada, pelaksanaan BUMDes sebagian besar terasa seperti dijalankan secara apa adanya dengan sumberdaya manusia dan produksi yang terbatas. Situasi tersebut tidak terlepas dari hubungan

struktural yang hirarkis dari kuasa di atas desa untuk menjalankan BUMDes. Kajian ini menemukan bahwa pengurus BUMDes secara moral tidak berkehendak untuk menyaingi sektor usaha warga yang telah ada, dan di sisi yang lain tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kekuatan modal besar di pasar neoliberal. Akibatnya menjadikan badan usaha tersebut memiliki resiko tinggi untuk gagal dengan modal yang pemerintah yang telah mencapai trilyunan rupiah.

BUMDes yang relatif berhasil, termasuk BUMDes Tirtamas yang menjadi fokus kajian ini berbasis pada potensi wisata desa. Sektor wisata di desa secara relatif tidak bersaing dengan kekuatan yang lebih besar sektor yang sama. Bahkan sektor wisata di desa lebih mampu bersifat generatif bagi warganya untuk ikut mengambil keuntungan secara ekonomi. Sementara itu BUMDes yang tidak memiliki sumberdaya untuk parwisata akan merasakan beratnya mengurus BUMDes. Tidak semua pengurus BUMDes memiliki keberanian untuk menciptakan lingkungan desanya menjadi berpotensi untuk pengembangan wisata. Akibatnya BUMDes sering terpaksa untuk menjalankan usaha yang akhirnya berpotensi bersaing dengan sektor usaha warga yang ada dan modalnya kecil.

Selain konteks sosial ekonomi BUMDes juga menghadapi kelangkaan tenaga kerja produktif karena mereka banyak terserap di sektor jasa dan industri di perkotaan. Akibatnya BUMDes diurus oleh warga senior yang kurang memiliki pengalaman bisnis maupun kompetisi pasar. Pengurus tidak memiliki kompetensi sebagai pelaku usaha, namun lebih merupakan adanya kelonggaran waktu dari pengelolanya yang juga sebagian besar memiliki pekerjaan utama. Dalam situasi tersebut Sistem Ekonomi Gotong Royong yang beberapa strateginya dijalankan oleh BUMDes tirtamas melalui kerjasama dengan BUMDes desa Sinduadi dan Minggir serta sejumlah pelaku UMKM telah mendorong kerjasama strategis sebagai alternatif dari sistem ekonomi neoliberal. SEGORO tidak menekankan kompetisi pasar bebas namun lebih mementingkan jaringan modal sosial dan ekonomi antar BUMDes dan kegiatan ekonomi warga termasuk UMKM sebagai mata rantai “pasok-produksi-distribusi-pasar” sebagai basis dari kerjasama.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agnew, John and Entrikin, J. Nicholas eds, 2004. *The Marshall Plan Today: Model and Metaphor*. New York: Routledge.
- Albert, M. (1993). *Capitalism vs. Capitalism*. New York: Four Wall Eight Windows.
- Aris Arif Mundayat, 2020a. “Perdebatan Mubyarto dan Arief Budiman: Pijakan untuk Merumuskan Sistem Ekonomi Pasar Pancasila” dalam *Prisma: Republik & Keadilan Sosial: Yang Terentass dan Yang Tertinggal*. Seri 3, Vol 3, 2020
- Aris Arif Mundayat, 2020b. “Sistem Ekonomi Gotong Royong: Menempatkan Desa dalam Sistem Negara dan Dunia” dalam *Kewargaan (Citizenship)*. Yogyakarta: Sanggar Inovasi Desa.
- Aris Arif Mundayat, 2021. *Menuju Tafsir Refelktif Kritis, Kajian Sosiologi-Antropologi* Yogyakarta: Impulse.
- Chang, H. J. (2010). *23 Things They Don't Tell You About Capitalism*. London: Penguin.
- Sorge, A Noorderhaven, N., and Koen, C. (2015). *Comparative International Management*, 2nd ed. Abingdon: Routledge.
- Belk, R. (2010). Sharing. *Journal of Consumer Research*, 36(5), 715–734.
- Belk, R. (2014). You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. *Journal of Business Research*, 67(8), 1595–1600.
- Boeke, J.H. (1953) *Economics and Economic Policy of Dual Societies*, New York: Institute of Pacific Relations.
- Budisusilo, Arief, 2017. *Jokowinomics: Sebuah Paradigma Kerja*. Jakarta: gagasan Bisnis.
- Duran-Palma, F. (2015). Seminars and discussion [lecture notes]. *Comparative International Management*. Dapat diakses di [https://learning.westminster.ac.uk/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course\\_id=\\_45914\\_1&content\\_id=\\_1345462\\_1&mode=reset](https://learning.westminster.ac.uk/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_45914_1&content_id=_1345462_1&mode=reset) [Accessed 7 December 2015].
- Dredge, Dianne and Gyimothy, Szilvia, (2017). “Collaborative Economy and Tourism”. In *Collaborative Economy and Tourism*. Cham, Switzerland: Springer
- Tommy Firman (2017) The urbanisation of Java, 2000–2010: towards ‘the island of mega-urban regions’, *Asian Population Studies*, 13:1, 50–66, DOI: 10.1080/17441730.2016.1247587
- Foucault, M., (2008), *The birth of biopolitics. Lectures at the College de France, 1978-79*. Palgrave MacMillan
- Guy Standing, 2011. *The Precariat: The Dangeorus Class?* Bloomsbury Academic .
- Guy Standing, 2014. *A Precariat Charter*. Bloomsbury Academic.

- Guy Standing, 2020. *Battling Eight Giants, Basic Income Now*. London: I.B. Tauris.
- Hall, Peter A., Soskice, David (eds.): *Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Harvey, D. (2010) *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Karl Marx, *The Capital*. Vol III. Chapter 24.
- Piketty, Thomas, 2020. *Capital and Ideology*. New York: Harvard University Press.
- Pratt, A. (2006) 'Neoliberalism and Social Policy'. In M. Lavalette and A. Pratt (eds) *Social Policy, Theories, Concepts and Issues* (3rd ed.) London: Sage Publications.
- Singer, H. W. (1999) [1996]. "Dual economy". In Kuper, Adam; Kuper, Jessica (eds.). *The Social Science Encyclopedia*. (2nd ed.). London: Routledge. Hlm.202.
- Lemke, T (2001). *The birth of bio-politics: Michael Foucault's lectures at the College de France on neo-liberal governmentality' in Economy and Society*.30, i.2, p. 190-207.
- Mills, Nicolaus, 2008. *Winning the Peace: The Marshal Plan and America's Coming of Age as a Superpower*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- National Statistic Bureau: *The Communiqué of China's National Economy and Social Development, Economy Daily*, March 1, 2003.
- Schild, Verónica (2000) Neo-liberalism's New Gendered Market Citizens: The 'Civilizing' Dimension of Social Programmes in Chile, *Citizenship Studies*, 4:3, 275-305, DOI:[10.1080/713658800](https://doi.org/10.1080/713658800).
- Van Der Eng, Pierre .2009. "Marshall Aid as a Catalyst in the Decolonization of Indonesia, 1947–49" dalam *Journal of Southeast Asian Studies*. Volume 19, Issue 2, September 1988 , pp. 335 – 352. Singapore: National University of Singapore. DOI:<https://doi.org/10.1017/S002246340000059X>.
- Vitols, S. (2001). *Varieties of Corporate Governance: Comparing Germany and the UK*. In Hall, P. A. and Soskice, D. (eds.) *Varieties of Capitalism: The institutional foundations of comparative advantage*. Oxford: Oxford University Press.
- Wacquant, Loic (2014) " Marginality, ethnicity and penalty in the neo-liberal city: an analytic cartography" in *Ethnic and Racial Studies*. 37 (10): 1687–1711.
- Wade R.H. (2007) Globalization as the Institutionalization of Neoliberalism: Commodification, Financialization, and the Anchorless Economy. In: Garside W.R. (eds) *Institutions and Market Economies*. Palgrave Macmillan, London <https://doi.org/10.1057/978023038994611>



- Weber, M. ([1922] 1978) *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Edited by G. Roth and C. Wittich. Berkeley: University of California. Press.
- Williamson, John, 1989. "What Washington Means by Policy Reform", in: Williamson, John (ed.): *Latin American Readjustment: How Much has Happened*, Washington: Peterson Institute for International Economics.
- Xiaoqin Ding, 2009. "The Socialist Market Economy: China and the World" in *Science & Society*, Vol. 73, No. 2, *China: Socialism, Capitalism, Market: Why Not? Where Next?* (Apr., 2009), pp. 235-241.